

**JURNAL**  
**PENGUSAHA DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014**  
**STUDI TENTANG: KANDIDASI PARA PENGUSAHA DI PDIP KOTA**  
**SURABAYA**



**Disusun Oleh:**

**Izzatun Nikmah Fauziah**

**NIM: 071113082**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**DEPARTEMEN POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**Semester Gasal/Tahun 2016/2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGUSAHA DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014:  
STUDI TENTANG KANDIDASI PARA PENGUSAHA DI PDIP KOTA SURABAYA**

**Jurnal ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui**

Dosen Pembimbing

**Dr. Dwi Windyastuti Budi Hendarti., Dra., MA**

NIP. 19610927.198810.2.001

**Pengusaha Dalam Pemilu Legislatif 2014:  
Studi Tentang Kandidasi Para Pengusaha di PDIP Kota Surabaya**

**Izzatun Nikmah Fauziah<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk mencapai sistem demokrasi yang transparansi dan akuntabel. Hal ini memengaruhi biaya politik yang tinggi untuk menyelenggarakan pemilu serentak di seluruh Indonesia. Terkait dengan semakin banyaknya pengusaha terjun ke dunia politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi motivasi pengusaha menjadi anggota legislatif serta untuk memahami bagaimana proses kandidasi yang dilakukan PDIP pada caleg pengusaha. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap calon legislatif pengusaha serta sekretariat DPC PDIP Kota Surabaya. Motivasi caleg pengusaha di PDIP kota Surabaya datang dari Partai. PDIP tidak melaksanakan rekrutmen secara terbuka. Seseorang yang menjadi caleg PDIP merupakan calon yang sebelumnya direkomendasikan oleh partai. Dalam melihat proses kandidasi penelitian ini menggunakan teori Kandidasi dari Matland, yang membagi proses kandidasi menjadi 3 tahapan yaitu seleksi diri, seleksi partai dan pemilihan.

*Kata Kunci: Kandidasi, caleg, pengusaha, pemilihan legislatif 2014*

**Abstract**

*Election system which is implemented in Indonesia has a purpose to reach transparency and accountable for democratic system. Thus, this changes time by time made the cost of politics becoming higher to This study aims to find out what motivates entrepreneurs become legislators and to understand how the process is done in PDIP of entrepreneur candidates. The primary data obtained through interviews of the candidates employers and secretarian DPC PDIP Surabaya. Motivation candidates PDIP businessman in the city of Surabaya came from the Party. PDIP not openly carry out recruitment. A person who becomes a PDIP candidates previously recommended by the party. In view of this research candidates process using candidacy theory of Matland, which divides the process into three stages, namely self-selection candidates, selection and the selection of the party.*

**Keywords: candidacy, candidates, employers, legislative elections in 2014**

**Pendahuluan**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga. Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia  
Email: Izza9010@gmail.com

Pemilu merupakan sarana untuk menciptakan demokrasi yang diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Demi mewujudkan pemilu yang demokrasi dan lebih baik, maka setiap periodenya sistem pemilu akan terus disempurnakan. Perubahan yang cukup terasa dan berdampak adalah ketika keputusan MK Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008 mengubah sistem pemilu yang sebelumnya menganut sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka (Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008). Sistem pemilu yang menuntut caleg untuk memperoleh suara terbanyak agar dapat duduk di kursi legislatif ini menimbulkan persoalan baru yaitu meningkatnya biaya politik untuk mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Caleg dituntut untuk meraih popularitas sekaligus elektabilitas di mata konstituen. Hal ini menyebabkan hanya beberapa kalangan saja yang dapat duduk dalam jajaran kursi legislatif. Biaya paling kecil dikeluarkan oleh mereka yang telah mempunyai modal sosial tinggi seperti halnya artis dan aktivis, sedangkan biaya paling besar dikeluarkan oleh mereka dari kelompok pengusaha yang modal sosialnya rendah. Dampak biaya politik yang tinggi ini ternyata berimbas pada partai politik dalam mengusung calonnya. Tren pengusaha masuk politik ini sebelumnya telah diprediksi oleh Anies Baswedan dalam tulisannya tentang *"the ruling elite"*. Pasca Soeharto lengser, aktivis mendominasi parlemen dan pemerintahan. Sehingga perubahan yang dialami perpolitikan Indonesia Menurut Anies adalah tren pasar dan dunia bisnis. Tren ini akan berlanjut terus dan melakukan perekrutan terhadap generasi muda untuk memasuki dunia bisnis secara intensif. Meskipun tidak sadar akan ambisi untuk menjadi ruling elite selanjutnya, namun tidak dapat dipungkiri mereka berpotensi untuk mewarisi ruling elite Indonesia di masa yang akan datang.

Dalam penelitian terdahulu menjelaskan apa yang melatarbelakangi pengusaha untuk terjun ke dunia politik. Peneliti belum menemui studi terkait dengan proses kandidasi para pengusaha. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada keterlibatan pengusaha dalam dunia politik serta hubungan pengusaha dengan pemerintahan. Kekuasaan para pejabat birokrasi mempermudah para pengusaha mendapatkan keistimewaan yang dapat digunakan untuk mempermudah pengusaha memperoleh lisensi dari pemerintah. Yoshihara Kunio (dalam Kapitalisme Semu Di Asia Tenggara, 1991) menyatakan bahwa kelompok pengusaha dan penguasa memiliki ketergantungan satu sama lain. Kelompok pengusaha di Indonesia ini belum mandiri serta tidak siap

mental ketika bersaing dengan kompetitor tanpa bantuan dari pemerintah. Kunio juga berpendapat bahwa para pengusaha hanya terfokus pada pencarian laba sebanyak-banyaknya serta berlomba untuk mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah.

Ada kekhawatiran yang muncul terkait dengan keterlibatan pengusaha dalam dunia perpolitikan. Ini disebabkan oleh karakter pengusaha pragmatis lalu bersinergi dengan iklim politik koruptif yang ada di Indonesia saat ini, apalagi di negara yang penegakan hukumnya belum benar-benar dapat diwujudkan, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan belum profesional sehingga kecilkemungkinan lembaga legislatif tidak dapat mendukung fungsinya sebagai lembaga pelayanan publik.

Selain dari sisi motif hal lain yang menjadi menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah tingkat persaingan antar pengusaha untuk bisa menjadi anggota legislatif. Melihat jumlah pengusaha yang sudah duduk di kursi legislatif relatif mendominasi maka pada proses awal tentunya pengusaha yang mendaftar juga relatif banyak. Banyaknya pengusaha yang mendaftar tersebut akhirnya menimbulkan kompetisi atau persaingan untuk dapat dipilih menjadi anggota legislatif. Studi ini dilaksanakan untuk mengetahui apa saja yang menjadi motivasi pengusaha di PDIP untuk menjadi calon anggota legislatif serta mengetahui proses kandidasi yang ada di PDIP kota Surabaya.

Menurut Ranney (1981:75) Kandidasi adalah proses saat partai politik memutuskan mana saja orang yang secara hukum layak memegang jabatan elektif yang akan dimasukkan dalam daftar calon legislatif lalu direkomendasikan serta didukung olehnya. Singkatnya kandidasi ini merupakan proses penyusunan calon anggota legislatif. Dalam suatu proses kandidasi kita dapat melihat representasi yang berusaha dihadirkan oleh partai politik melalui kolektivitas entitas tertentu misalnya demografis, gender, ideologi, agama, latar belakang dan lain sebagainya. Banyak faktor yang dipertimbangkan oleh partai politik dalam memutuskan seseorang untuk menjadi kandidat, dengan harapan bahwa kandidat yang diusungnya tersebut mampu memperoleh banyak suara yang tentunya akan menguntungkan juga bagi partai. Oleh sebab itu dalam tahap awal ini, proses kandidasi menjadi sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap kualitas calon legislatif.

## **Teori Kandidasi Matland**

Matland (2002) mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon legislatif, seorang pengusaha harus melalui 3 (tiga) tahapan yaitu (1) tahap seleksi diri, (2) tahap seleksi partai, dan (3) tahap pemilihan (diseleksi oleh pemilih). Menurut peneliti, proses kandidasi itu terdapat didalam rekrutmen politik. Kandidasi dapat menunjukkan dimana lokus kekuasaan partai politik itu berada sesungguhnya. Apakah kekuasaan tersebut bersifat oligarkis atau menyebar. Pada tahap seleksi diri, seseorang calon dinilai dari keinginannya untuk melibatkan diri dalam sebuah sistem politik. Mereka berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak membatasi siapa pun untuk maju ke dalam pencalonan sehingga setiap individu berhak mendapatkan pengakuan dan diperlakukan setara dalam pencalonan walaupun mereka tidak berasal dari kalangan politisi. Setelah memiliki rasa percaya diri akan kapabilitas yang dimiliki dan merasa mampu bersaing dengan calon legislatif yang berasal dari latar belakang berbeda, seorang calon individu tersebut akan melalui tahapan seleksi dari partai politik pengusungnya. Seleksi calon menurut Ranney (dalam Catz dan Crotty, 2014) adalah partai politik melakukan proses penilaian terhadap calon untuk menetapkan bakal calon mana yang secara hukum layak memegang jabatan elektif dan dapat dimasukkan dalam surat suara untuk direkomendasikan oleh partai politik sebagai calon atau daftar calon dalam komunikasi pemilu. Terlebih lagi, seleksi calon oleh partai politik berbeda dengan rekrutmen legislatif karena seleksi calon berlangsung hampir seluruhnya di dalam suatu partai dimana negara memiliki batasan untuk menentukan kriteria seleksi calon. Selain menjadi tahapan penting dalam proses kandidasi, seleksi calon juga merupakan arena penting bagi perebutan kekuasaan internal partai.

Dalam tahapan ini terdapat gatekeepers yang melakukan seleksi dengan tuntutan kandidat. Proses ini akan menghasilkan output di dalam proses kandidasi. Sedangkan dalam prosedur nominasi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain dan dapat dibedakan dengan sejumlah faktor, yang meliputi: 1) partisipasi dan sentralisasi atau desentralisasi dari proses rekrutmen, 2) Berorientasi patronage dengan sistem yang birokratis. Dengan demikian setiap rekrutmen anggota legislatif akan berkaitan dengan sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian yang diterapkan di dalam sistem politik suatu negara.

Keputusan dari gatekeepers akan diajukan pada pemilihan umum sehingga nama calon akan dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas. Proses ini adalah babak penentuan dari upaya yang telah dilakukan, apakah calon dan partai politik pengusung telah berhasil mengambil simpati masyarakat sehingga mereka memilih calon tersebut. Proses seleksi calon mempertarungkan satu sama lain banyak calon yang ingin menjadi salah satu dari beberapa orang yang akan bersaing di kursi-kursi yang aman, atau dalam posisi daftar aman selama pemilihan.

Dalam berkampanye, pihak kontestan harus paham dan tahu secara baik *target audience* mereka (Smith & Hirst dalam Firmanzah, 2008). Cara memilih dalam menentukan pilihannya bukanlah hal yang sederhana dan dapat direduksi dalam satu model. Banyak kalangan dari pemilih akan menilai kepuasan atau kekecewaan mereka dalam menentukan pilihan yang memiliki karakteristik dari tiap calon. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat sangat membantu untuk meningkatkan reputasi dan citra suatu partai politik dalam jangka panjang. Dengan baiknya reputasi, suatu partai politik dan kontestan dapat mudah dalam membuat masyarakat percaya untuk memberikan suara mereka terutama apabila masyarakat telah mengetahui *track-record* dari pilihan mereka.

Teori kandidasi ini didukung oleh Teori Contagion (Matland dan Studlar, 1996) dalam penelitian ini. Teori Contagion menyatakan bahwa dengan adanya Sistem representasi proporsional membantu perempuan karena penularan (*contagion*) lebih mungkin terjadi dalam sistem ini daripada dalam sistem mayoritas. Penularan adalah suatu proses di mana partai-partai menjalankan berbagai kebijakan yang diprakarsai oleh partai politik lainnya (International IDEA. 1998. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta: AMEPRO. Hal. 82. Kita mulai menguji apakah partai-partai besar akan lebih cepat bergerak untuk mempromosikan perempuan ketika menghadapi isu-isu ini dengan partai lain dalam sistem representasi proporsional dibandingkan dalam sistem mayoritas. Asumsinya adalah bahwa hal ini harus terjadi karena biaya-biaya untuk merespon akan menjadi lebih rendah dalam sistem representasi proporsional di banding dengan sistem mayoritas dan kemungkinan memperoleh hasil yang lebih besar.

Dalam penelitian ini mengadaptasikan penelitian terdahulu yang membahas perempuan calon legislatif sebagai ikon partai untuk dapat maju dalam pemilu sehingga peneliti mengubah variabel perempuan menjadi pengusaha calon legislatif. Peneliti menilai bahwa maraknya para pengusaha yang terjun dalam perpolitikan terutama terdapat partai asosiasi pengusaha menjadikan peneliti ingin mengamati apakah teori penularan ini akan berdampak pada partai PDIP dalam mengusung calon legislatif. Pengusaha memiliki peluang yang sama seperti penjelasan dalam teori contagion .

### **Proses Kandidasi**

Perlu diketahui bahwa dalam proses kandidasi terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut 1) Seleksi diri, yang meliputi ambisi personal, ideologi, dan dorongan eksternal. 2) Proses seleksi oleh partai terhadap seorang pengusaha yang mencalonkan diri. 3) Tahap pemilihan seorang pengusaha yang terjun dalam dunia politik pada pemilu legislatif Kota Surabaya tahun 2014. Pada saat menjelang diselenggarakannya pemilu legislatif Kota Surabaya tahun 2014, setiap kader partai politik berkesempatan untuk mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif. Kader-kader ini memiliki beberapa pertimbangan untuk dapat maju dalam arena politik tersebut. Pertimbangan yang mereka buat tentunya tidak terlepas dari untuk mewujudkan kebaikan bersama dan potensi mereka untuk mewujudkan hal tersebut. Calon legislatif menilai bahwa dirinya layak untuk duduk dalam kursi DPRD dikarenakan kemampuan dan pengalaman mereka yang dapat mendukung visi dan misi tiap calon. Kesadaran atas kemampuan ini merupakan bekal yang mampu meningkatkan rasa kepercayaan seorang caleg dalam mengajukan diri pada proses seleksi.

Dalam proses pengajuan nama-nama bakal calon pemilihan umum legislatif, tentunya sosok seorang calon legislatif memiliki alasan pribadi yang melandasi dirinya untuk maju berlaga. Alasan individu ini menjadi modal awal seorang caleg pengusaha yang terdiri dari beberapa faktor yaitu: 1) Mempunyai latar belakang sebagai pengusaha merupakan keuntungan lebih bagi caleg pengusaha sebab pengusaha memiliki modal finansial yang cukup untuk mencalonkan diri seiring dengan tingginya biaya pemilu saat ini. 2) Dengan menjadi anggota legislatif dirasa akan menguntungkan terkait dengan perluasan jaringan yang dapat menunjang karirnya. 3) sejak diberlakukannya pemilihan langsung pada pemilu legislatif hal ini meingkatkan



keinginan masyarakat untuk mengubah keadaan perpolitikan di negara ini. Kondisi sosial inilah yang menjadi salah satu faktor untuk terjun ke dunia politik, agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

Tidak hanya mempertimbangkan motivasi personal dalam mencalonkan diri dalam kontestasi politik namun mereka juga mendapat pandangan-pandangan yang berasal dari luar. Pengusaha caleg yang berinteraksi atas dasar dorongan eksternal, yaitu dorongan-dorongan yang berasal dari luar dirinya akan menggunakan faktor eksternal tersebut sebagai pertimbangan baik buruknya dalam pencalonan. Faktor ini tidak terlepas dari dorongan orang-orang terdekat bahkan kolega pengusaha caleg tersebut seperti pihak keluarga, komunitas, perusahaan, masyarakat, bahkan mereka mendapatkan rekomendasi dari DPC PDIP sebagai partai pengusungnya. Sehingga, keyakinan seorang pengusaha caleg ini semakin kuat untuk maju dalam arena pemilu 2014 di Kota Surabaya. Partai politik merupakan faktor utama sebagai pendukung seorang pengusaha caleg, karena persetujuan partai atas nama yang diusungnya kelak dalam penominasian merupakan strategi untuk mendongkrak elektabilitas partai maupun individu. Pengusaha caleg seluruhnya dipilih oleh pengurus PDIP dari tingkat ranting, PAC, maupun DPC, semuanya bisa merekomendasikan seseorang yang dianggap berpotensi untuk ikut tahap penjaringan. Ini berarti bahwa pengusaha caleg mendapat dukungan penuh oleh partai dari awal penjaringan hingga proses penominasian karena telah mendapatkan mandat langsung dari DPC.

Seleksi partai akan diawali dengan proses penjaringan. Pada proses penjaringan ini semua anggota partai yang ada di tingkat ranting melakukan penjaringan caleg sebanyak-banyaknya. Setelah dijaring, lalu bakal calon anggota legislatif mendaftarkan diri dengan mengambil formulir pendaftaran. Adapun formulir tersebut berisi data pribadi, pengalaman organisasi, serta jabatan-jabatan yang pernah dimiliki di partai. Dalam hal ini tentu sangat menguntungkan terkait nilai skoring bagi bakal calon anggota legislatif yang telah lama mengabdikan ke partai. Ketika hendak mengumpulkan formulir pendaftaran sebelum tanggal 15 maret 2013, bakal calon legislatif juga wajib menyertakan kelengkapan administratif. Setelah tahap pengumpulan persyaratan administratif selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi. Tugas Tim verifikasi ini hanya bersifat administratif dengan menyampaikan data secara objektif, dilengkapi dengan bukti-bukti berkas yang dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya tim

verifikasi ini menyampaikan hasil verifikasi berupa data pada Rakercabsus (rapat kerja cabang khusus) yang diselenggarakan oleh DPC. Setelah lolos pada tahapan ini maka ditetapkannya daftar calon sementara. Dalam Rakercabsus ini dibentuk tim penyaring yang bertugas untuk menetapkan nomer urut caleg. Beberapa hal yang akan dipertimbangkan pada tahap ini yaitu rekam jejak pengabdian di partai dan di masyarakat, tingkat pendidikan, pengalaman jabatan, hasil penugasan partai, hasil tes bebas narkoba dan prikotropika, hasil psikotes dan hasil penilaian skoring. Pada tahap skoring inilah yang masih sering menjadi perdebatan antara pihak partai dengan caleg. Meskipun dengan sistem proposional terbuka yang dianut Indonesia saat ini, namun masih ada yang optimis bahwa nomer urut berpengaruh dalam pencalonan. Selanjutnya pada tahapan ini masing-masing calon akan berusaha meyakinkan pemilih. Penggunaan satu orang satu suara (one man one vote) mengharuskan caleg untuk mencari dukungan massa dengan jumlah yang besar agar mendapatkan suara terbanyak. Hal ini akan membutuhkan dukungan penuh dari partai. Namun fakta yang ditemui dalam tahap pemilihan ini adalah dukungan dari partai ternyata minim dalam memfasilitasi kandidat pengusaha dalam berkampanye. Sebagian besar kandidat pengusaha mengakui untuk biaya kampanye adalah murni dari biaya yang dikeluarkan oleh caleg itu sendiri, namun ada beberapa caleg yang diberikan atribut seperti bendera, spanduk dan beberapa atribut kecil lainnya. Dalam pemilihan legislatif di kota Surabaya tahun 2014 ini, partai hanya memberikan dukungan penuh ketika menjaring, menyeleksi hingga tahap ditetapkannya caleg pengusaha sebagai calon legislatif, sejak itu partai hanya memberi dukungan sebatas dukungan beberapa atribut kampanye. Ketika pemilihan itu akan diserahkan kepada masing-masing caleg pengusaha.

## **Penutupan**

Setelah melakukan berbagai analisis terkait caleg pengusaha yang maju dalam kontestasi politik. Caleg pengusaha di PDIP Kota Surabaya patut diberikan apresiasi yang tinggi terkait kesadaran politik mereka yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun pada awalnya partai yang melakukan pelamaran terlebih dahulu kepada caleg, namun caleg pengusaha dengan segala kesiapannya mampu mengusahakan amanat dari partai. Yang menjadi motivasi caleg pengusaha pada pemilu legislatif 2014 yaitu meliputi dorongan dari partai, motivasi personal, dorongan masyarakat serta orang-orang terdekat. Yang paling berpengaruh besar terhadap caleg

pengusaha akhirnya memutuskan untuk running for office adalah pengaruh dari partai. Caleg pengusaha direkomendasikan oleh partai karena dianggap mampu untuk mendulang suara partai. Caleg pengusaha cenderung mengedepankan isu kesejahteraan rakyat untuk meyakinkan partai serta konstituennya. Dorongan personal yang dimiliki caleg pengusaha terkait mereka ingin meningkatkan elektabilitasnya.

PDIP Kota Surabaya hanya menerima bakal caleg pengusaha melalui rekomendasi para anggotanya yang berada di tingkat anak ranting hingga DPC, sehingga PDIP tidak membuka pendaftaran secara umum untuk masyarakat luas yang ingin menjadi anggota legislatif. Rekomendasi dari anggota partai untuk mencalonkan pengusaha tidak terlepas dari kesiapan pengusaha dalam mencalonkan dirinya, partai juga melihat kemampuan pengusaha itu apakah mampu dalam mendulang suara partai.

Posisi mereka sebagai caleg pengusaha dirasa membantu mereka dalam pencalonan, karena mereka mempunyai keunggulan dalam segi finansial yang lebih tinggi. Dengan sistem pemilu yang dianut Indonesia saat ini mengakibatkan biaya politik yang semakin mahal. Caleg dituntut untuk meraih popularitas dan elektabilitas yang tinggi untuk dapat memenangkan kontestasi politik ini. Serangkaian proses seleksi yang dilalui oleh caleg pengusaha ini menggambarkan bahwa caleg pengusaha yang diunggulkan dalam segi finansial juga harus memiliki modal sosial serta politik agar mampu melewati proses pencalonan.

## **Daftar Pustaka**

- Alfian, M. Alfian. (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Azhar, Ali. *Relasi Pengusaha Dan Penguasa Dalam Demokrasi*. Bali: Universitas Udayana
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: PT. Obor Indonesia
- Kansil, CST. (2001). *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Katz dan Crotty. (2014). *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Labolo, Muhadam. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Michels, Robert. (1980). *Partai Politik*. Jakarta.

Muhaimin, Yahya A. (1990). *Bisnis Dan Politik*. Jakarta: LP3ES.

Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Kunio, Yoshihara. (1991). *Kapitalisme Semu dan Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Dodi Suprihanto. (2011). *Pengusaha dan Politik: Keterlibatan Pengusaha Dalam Dunia Politik Di Sumatra Barat 1999-2009*. Jurnal UNAND. Padang: Universitas Andalas.